

SKRIPSI

**HAK GUGATAN PEMILIHAN DAN MASYARAKAT
DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD ALFARIZI
NIM. 1910211310060**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

**HAK GUGATAN PEMILIHAN DAN MASYARAKAT
DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**MUHAMMAD ALFARIZI
NIM. 1910211310060**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN
HAK GUGATAN PEMILIHAN DAN MASYARAKAT DALAM
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON
TUNGGAL

Diajukan oleh
MUHAMMAD ALFARIZI

NIM. 1910211310060

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin, 19 Juni 2023 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

Diketahui

Banjarmasin, 20 Juni 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**HAK GUGATAN PEMILIHAN DAN MASYARAKAT
DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL**

Diajukan oleh

MUHAMMAD ALFARIZI
NIM. 1910211310060

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 328/UN8.A.11/S9/2023
Tanggal : 22 JUN 2023

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia

Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota : M. Ali Amrin S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Pembimbing ketua /Anggota : Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H (Alm)
Pembimbing/Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Anggota : Deden Koswara, S.H, M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 1514/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 19 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alfarizi
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310060
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 Agustus 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (SI)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

Hak Gugatan Pemilihan dan Masyarakat dalam Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Alfarizi
NIM. 1910211310060

HAK GUGATAN PEMILIHAN DAN MASYARAKAT DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL

MUHAMMAD ALFARIZI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui ukuran sebuah Hak Gugatan Pemilihan dan Masyarakat dalam Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal, serta mengapa dilakukan pembatasan Gugatan Pemilih dan Masyarakat dalam Perselisihan hasil Pilkada Calon Tunggal dan bagaimana Idealnya Hak Gugatan Pemilih dan Masyarakat dalam Perselisihan hasil Pilkada Calon Tunggal. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Hasil dari penelitian skripsi ini antara lain:

Pembatasan gugatan pemilih dan masyarakat dalam perselisihan hasil Pilkada calon tunggal dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa gugatan pemilih hanya dapat diajukan jika terdapat bukti-bukti adanya kecurangan, pelanggaran, atau tindakan tidak jujur yang mempengaruhi hasil pemilihan. Perlu diingat bahwa dalam mengajukan gugatan pemilih atau masyarakat, diperlukan bukti-bukti yang kuat dan jelas agar gugatan dapat diterima dan diproses. Selain itu, pihak yang mengajukan gugatan juga harus mematuhi prosedur dan persyaratan yang berlaku agar gugatan tersebut dapat diterima dan diproses secara sah dan legal.

Hak gugatan pemilih dan masyarakat dalam perselisihan hasil Pilkada Calon Tunggal harus diakui dan dilindungi oleh hukum. Pemerintah dan pihak berwenang harus bertanggung jawab atas keamanan dan keabsahan pemilihan, serta memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara transparan, adil, dan damai.

Kata Kunci : Hak Gugatan Perselisihan, Pilkada Calon Tunggal

RINGKASAN

HAK GUGATAN PEMILIHAN DAN MASYARAKAT DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL

(MUHAMMAD ALFARIZI: 2023, 40 hlm)

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Hak Gugatan Pemilihan dan Masyarakat dalam Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal.

Dalam Hak Gugatan Pemilihan dan Masyarakat dalam perselisihan hasil Pilkada Calon Tunggal. Namun Hak Gugatan Pemilihan dan masyarakat tersebut belum diatur secara kongkrit di dalam Undang Undang Pilkada. Permasalahannya berlakunya Undang-Undang Pilkada serta perubahannya membatasi hak gugatan pemilih dan masyarakat.

Sehingga perselisihan hasil Pilkada pada Undang Undang Pilkada serta perubahannya mengakibatkan pemilih dan masyarakat tidak memiliki kedudukan hukum dalam perselisihan hasil Pilkada, sehingga selama persyaratan kedudukan hukum tidak terpenuhi, maka amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah tidak dapat diterima, meskipun pada kenyataannya terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada yang menciderai demokrasi.

Dinamika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung ternyata dilapangan menghadapi banya masalah yang harus diselesaikan secara normatif. Sebagaimana diuraikan terdahulu, masalah yang muncul terkait dengan proses yang didominasi oleh partai politik telah terselesaikan keluarnya Putusan

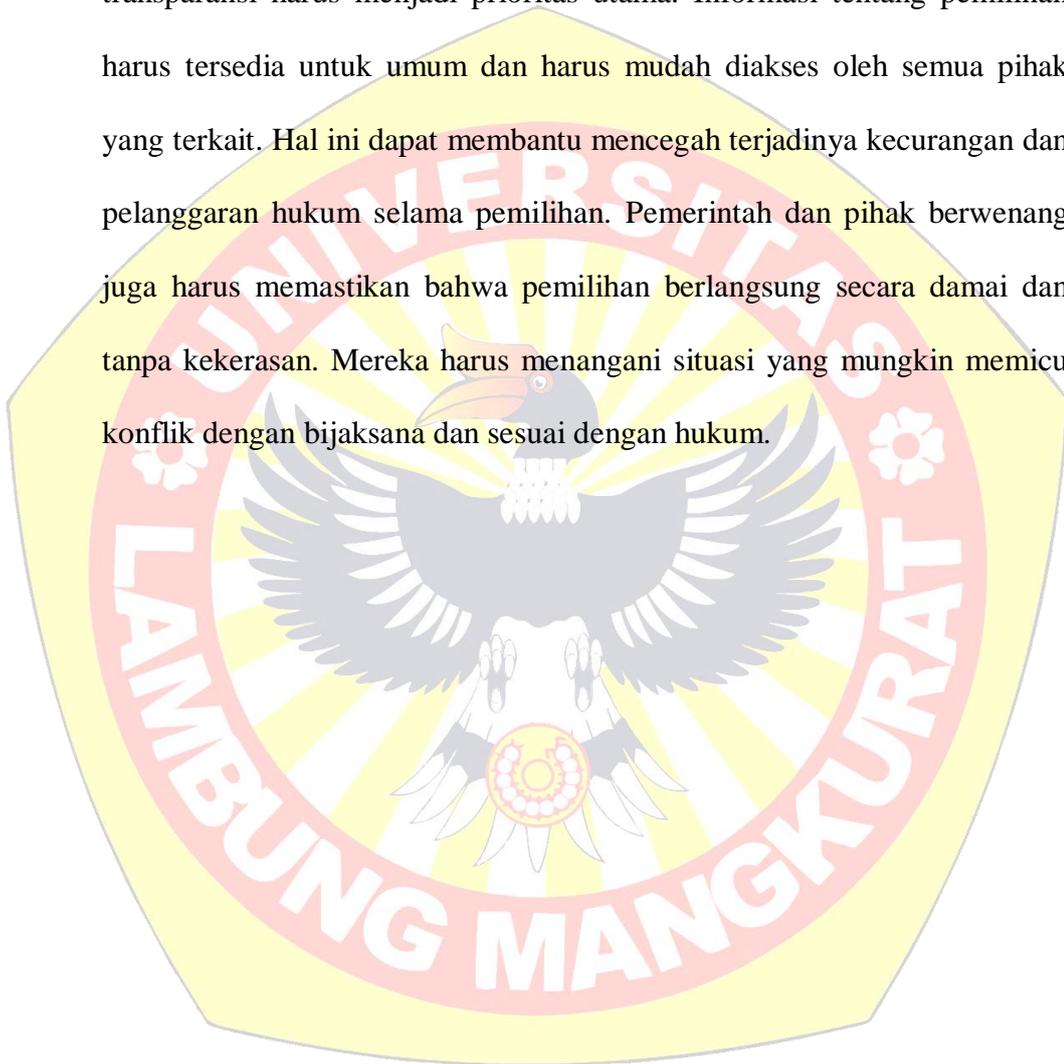
Mahkamah Konstitusi yang membuka akses untuk calon perseorangan. Ternuka akses bagi calon perseorangan kemudian menimbulkan masalah baru terkait dengan dukungan awal yang menjadi persyarat bagi calon perseorangan dan masalah ini pun kemudian dapat diselesaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Belum banyaknya masyarakat tentang mengenai Mengenai Hak Gugatan Pemilihan dan Masyarakat dalam perselisihan hasil Pilkada Calon Tunggal sehingga menarik untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Beberapa implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai calon tunggal tersebut menimbulkan kekosongan hukum terkait mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah terhadap daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. Bukan hal yang tidak mungkin apabila kehadiran calon tunggal dapat terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dimana menyebutkan bahwa sengketa pemilihan terdiri atas sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota. Peraturan MKRI No. 4 Tahun 2015 telah mengatur

hal baru terkait dengan legal standing dari pemohon dalam sengketa pemilihan kepala daerah bagi daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon yaitu para pasangan dan juga pemantau pemilihan.

2. Dalam situasi di mana terdapat perselisihan hasil Pilkada Calon Tunggal, transparansi harus menjadi prioritas utama. Informasi tentang pemilihan harus tersedia untuk umum dan harus mudah diakses oleh semua pihak yang terkait. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya kecurangan dan pelanggaran hukum selama pemilihan. Pemerintah dan pihak berwenang juga harus memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara damai dan tanpa kekerasan. Mereka harus menangani situasi yang mungkin memicu konflik dengan bijaksana dan sesuai dengan hukum.



UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, dan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul HAK GUGATAN PEMILIHAN DAN MASYARAKAT DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL.

Di dalam skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu selain memohon maaf atas kekurangan tersebut, penulis juga sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menghanturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai ini;
3. Bapak (Alm) Dr. Akhmadi Yusran S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah bersedia meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga penulis menyelesaikan

penulisan skripsi ini

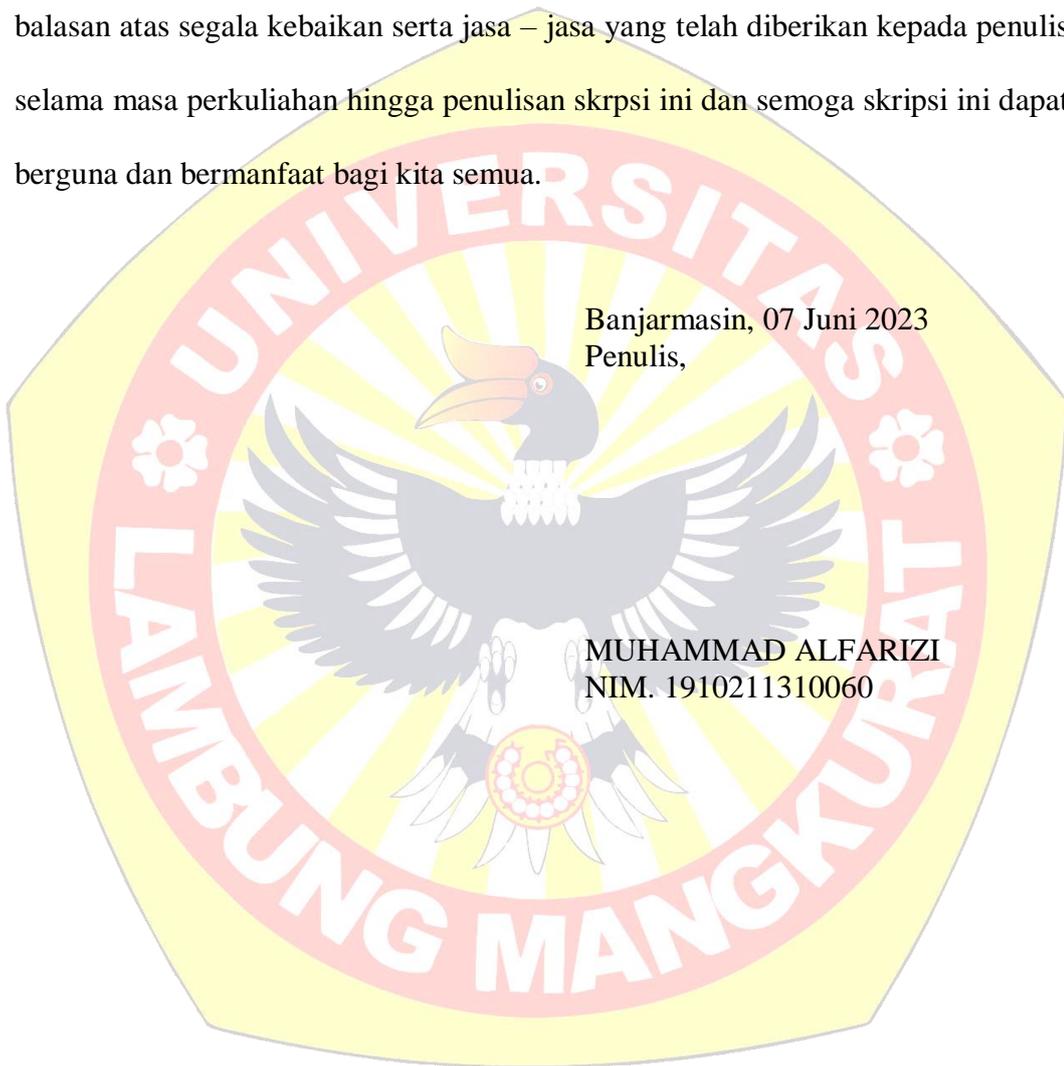
4. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik, dan memberikan ilmunya yang sangat berguna kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis;
6. Seluruh Staff, Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Staf Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Kedua Orang Tua yang saya cintai, Ayah saya Agus Wahyuddin S.H Dan Ibu saya Ida Hartini yang telah mendidik saya hingga dewasa, yang selalu mendukung, mensupport serta mendoakan saya, serta dukungan finansial sehingga bisa membuat penulis berada dititik ini. Terimakasih telah melahirkan saya didunia ini ;
8. Kakak kandung saya yang bernama Akhmad Ryan Hidayat S.H Dan Willy Akbar Rafsanjani S.H yang selama ini telah mensupport dan membantu saya dalam berbagai macam hal untuk menyelesaikan studi ini ;
9. Firyal Naila Sabila selaku partner penyamangat dalam penulisan skripsi yang telah banyak membantu penulis baik itu dalam bentuk doa, dukungan,

bantuan dalam bertukar pikiran, waktu dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih yang sedalam –dalamnya atas dukungan, bantuan, motivasi seta doanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan serta jasa – jasa yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skrpsi ini dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, 07 Juni 2023
Penulis,

MUHAMMAD ALFARIZI
NIM. 1910211310060



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
RINGKAKASAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Tipe Penelitian	11
4. Jenis Bahan Hukum	11
5. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan umum Pembatasan Gugatan dalam Perselisihan hasil Pilkada Calon Tunggal	13
B. Tinjauan Idealnya Hak Gugatan Pemilih dan Masyarakat dalam Perselisihan hasil Pilkada Calon Tunggal	17
C. Calon Tunggal dalam Pilkada	20
BAB III PEMBAHASAN	23
A. Pembatasan Gugatan Pemilih dan Masyarakat dalam Perselisihan hasil Pilkada Calon Tunggal	23
B. Idealnya Hak Gugatan Pemilih dan Masyarakat dalam Perselisihan hasil Pilkada Calon Tunggal	30
BAB IV PENUTUP	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	

